**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten tanggamus secara geografis wilayah kabupaten pringsewu terletak pada provinsi 104”42’-105”8’ Bujur Timur dan antara 5”8’-6”8’Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah administratif kabupaten pringsewu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pringsewu memiliki luas wilayah daratan 625 km2,yang hamper seluruhnya wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

1. Administrasi pemerintahan

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di propinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten tanggamus, dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 di resmikan pada tanggal 3 april 2009 oleh menteri dalam negeri. Selanjutnya yang ditunjuk sebagai pj. Bupati Pringsewu yang pertama kali adalah Ir.H. Masdulihaq, yang memimpin pemerintahan di kabupaten pringsewu kemudian digantikan oleh H. Helmi Machmud dan digantikan kembali oleh Edi, dan Bupati Pringsewu saat ini dijabat oleh Hi. Sujadi Saddat.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 wilayah kecamatan, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pringsewu :

**Tabel 4.1**

**Kecamatan di Kabupaten Pringsewu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Ibukota |
| 1 | Pardasuka | Pardasuka |
| 2 | Ambarawa | Ambarawa |
| 3 | Pagelaran | Gumuk Mas |
| 4 | Pagelaran Utara | Fajar Mulya |
| 5 | Pringsewu | Pringsewu |
| 6 | Gadingrejo | Gadingrejo |
| 7 | Sukoharjo | Sukoharjo |
| 8 | Banyumas | Banyumas |
| 9 | Adiluwih | Adiluwih |

Wilayah Kabupaten Pringsewu mulai tahun 2013 terdiri dari 5 kelurahan serta 126 pekon (desa). Pada tahun 2013, jumlah kecamatan di Kabupaten Pringsewu menjadi 9 kecamatan.

1. Penduduk

Berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa. Banyaknya penduduk Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 390.486 jiwa yang terdiri dari laki-laki 200.092 jiwa dan perempuan 190.394 jiwa. Sex Ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan Perempuan sebesar 105,09 yang berarti bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata sekitar 625 jiwa per kilometer persegi. Secara rinci persebaran penduduk perkecamatan adalah:

**Tabel 4.2**

**Persebaran penduduk di Kabupaten Pringsewu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas (Km2) | Kepadatan (jiwa/km2) |
| 1 | Pardasuka | 34107 | 94,64 | 364 |
| 2 | Ambarawa | 34036 | 30,99 | 1.108 |
| 3 | Pagelaran | 43330 | 72,47 | 643 |
| 4 | Pagelaran Utara | 15370 | 100,28 | 155 |
| 5 | Pringseu | 81405 | 53,29 | 1.545 |
| 6 | Gadingrejo | 72860 | 85,71 | 857 |
| 7 | Sukoharjo | 47771 | 72,95 | 662 |
| 8 | Banyumas | 20302 | 39,85 | 515 |
| 9 | Adiluwih | 34710 | 74,82 | 468 |
| Pringsewu | | 386891 | 625,00 | 625 |

Dari data tersebut, kecamatan pringsewu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sekitar 1.545 jiwa/km2 dan yang paling jarang adalah kecamatan pagelaran utara yaitu hanya sekitar 155 jiwa/km2. Komposisi penduduk dapat dibagi menurut umur dan jenis kelamin, struktur umur penduduk sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang bisnis.pengetahuan mengenai struktur umur penduduk disuatu wilayah diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan yang pasti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu contoh misalnya jika penduduk suatu wilayah banyak yang termasuk dalamkelompok umur balita maka kebutuhan akan fasilitas kebutuhan balita dan peningkatan gizi akan menjadi hal yang sangat penting.

Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) dan umur produktif (usia 15-64 tahun) lebih dari 27% penduduk kabupaten Pringsewu berumur antara 0-14 tahun dan 66% merupakan penduduk usia produktif (15-64) pada Kabupaten Pringsewu tingkat kelahiran masih sangat tinggi meskipun sudah mulai menurun disbanding pada tahun sebelumnya.

Salah satu indikator kependudukan yang berhubungan dengan komposisi umur penduduk adalah *Dependency Ratio* (DR) *Dependency Ratio* secara umum menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas) semakin kecil *Dependency Ratio* semakin kecil pula beban kelompok usia produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif dan sebaliknya.

**Tabel 4.3**

**Kelompok Usia di Kabupaten Pringsewu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0-14 th | 55.306 | 52.165 | 107.471 |
| 15-64 th | 133.636 | 125.709 | 259.345 |
| 65+ th | 11.230 | 12.439 | 23.669 |
| **Angka Ketergantungan** | **49,79** | **51,39** | **50,57** |

1. **Gambaran Hasil Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten pringsewu data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data time series atau rentang waktu mulai dari tahun 2011-2016 alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) SPSS 17 dengan metode analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana perkembangan secara umum belanja modal pada kabupaten pringsewu melalui Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi umum.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang di peroleh daerah dari sumber kekayaan daerah yang di kelola oleh pemerintah daerah Total pendapatan daerah yang di peroleh kabupaten pringsewu tahun 2011-2016 bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

**Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli Daerah** |
| 2011 | 19.347.217,00 |
| 2012 | 29.090.633,00 |
| 2013 | 30.421.122,00 |
| 2014 | 63.339.740.42 |
| 2015 | 61.765.136,00 |
| 2016 | 68.157.777,00 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan tabel 1 realisasi pendapatan asli daerah diatas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari tahun ketahunnya masih rendah walaupun rendah namun selalu mengalami peningkatan dapat diketahui pada tahun 2011 PAD berjumlah 19.347.21,00 dan pada tahun 2012 berjumlah29.090.633,00 terjadi peningkatan sebesar 27.155.921

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Total dana Alokasi Umum yang di terima oleh Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Realisasi Dana Alokasi Umum**

**Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Dana Alokasi Umum** |
| 2011 | 368.176.154,00 |
| 2012 | 443.529.040,00 |
| 2013 | 499.454.898,00 |
| 2014 | 547.622.366,00 |
| 2015 | 570.582.781,00 |
| 2016 | 633.088.784,00 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan tabel 2 Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2011-2016 terdapat fenomena yang mana terjadi peningkatan dana alokasi umum pertahunnya, dapat dilihat pada tahun 2011 pendapatan dari dana alokasi umum sebesar 368.176.154,00 (dalam milyar rupiah) dan dapat dilihat pula pada tahun berikutnya yang semakin naik. Meskipun peningkatan pertahunnya tidak terlalu banyak tetapi peningkatan dana alokasi umum kabupaten pringsewu terjadi secara signifikan.

1. Kemiskinan

Kemiskinan, adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah, dimana pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, hal ini telah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan daerahnya sendiri Pada kabupaten pringsewu dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan masih cukup tinggi karena dapat dilihat setiap tahun mengalami kenaikan dengan kenaikan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2014 ke 2015, hal tersebut dapat dilihat dari data kemiskinan pringsewu pada tahun 2011-2016.

**Tabel 4.6**

**Data Kemiskinan Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2011-2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Angka kemiskinan |
| 2011 | 11,62 |
| 2012 | 11.01 |
| 2013 | 9,81 |
| 2014 | 9,83 |
| 2015 | 11.80 |
| 2016 | 11,73 |

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di kabupaten pringsewu setiap tahun meningkat. Pada tahun 2011 dengan jumlah 11,62 menurun sedikit menjadi 11,01 dengan penurunan yang masih dibilang sedikit pemerintah perlu meningkatkan pengalokasian belanja modal sehingga dapat lebih banyak menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten pringsewu.

1. **Analisis Data**
2. **Hasil Uji Asumsi Klasik**
3. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidaknya, untuk itu data yang sudah ada harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas, data yang baik dan layak digunakan daam penelitian harus terdistribusi secara normal jika si.<0,05 maka data dikatakan tidak terdistribusi secara normal namun ketika data > 0,05 maka sikatakan data tersebut terdistribusi secara normal. Adapun alat yang digunakan oleh penguji dalam pengujian uji normalitas yaitu dengan menggunakan uji *kolmogrof-smirnov* dalam program SPSS 17. Hasil analisis uji normalitas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Normalitas**

| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unstandardized Residual |
| N | | 6 |
| Normal Parametersa | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 14.71134348 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .163 |
| Positive | .111 |
| Negative | -.163 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .399 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .997 |

a. Test distribution is Normal.

*Sumber*: data diolah SPSS 17

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan metode *one kolmogrof-smirnov* dapat diketahui bahwasannya nilai residual dari variabel dependen dan variabel independent pada jumlah sample (N) sebesar 6 adalah 0,997 dengan demikian data dari penelitian ini dapat dikatakan normal karena nilai residualnya lebih besar dari nilai signifikansi adalah > 0,05 atau 0,997 > 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti tersebut ada atau tidak adanya gangguan. multikolenaritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinearitas. Cara untuk mengetahui apakah ada atau tudaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat *variance inflation factor* (VIF) dan tolerance, apabila vif kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas, adapun hasil dari pengolahan data sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -2315.151 | 332.537 |  | -6.962 | .020 |  |  |
| PAD | -3.580 | 1.362 | -.501 | -2.628 | .119 | .206 | 4.866 |
| DAU | 1.999 | .287 | 1.143 | 6.977 | .020 | .278 | 3.597 |
| Kemiskinan | 139.381 | 22.432 | .783 | 6.213 | .025 | .469 | 2.130 |
| a. Dependent Variable: belanjamodal | | | | | | | | |

*Sumber*: data diolah SPSS 17

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel dependenden, hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas.

1. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Beberapa yang sering digunakan adalah uji *durbin Watson,* uji dengan *run test* dan jika data observasi diatas 100 data sebaiknya menggunakan uji *lagrange multiplayer.* Pada data ini akan digunakan uji dengan *run tets* sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

**Hasil Uji Autokolerasi**

| **Runs Test** | |
| --- | --- |
|  | Unstandardized Residual |
| Test Valuea | -23.39678 |
| Cases < Test Value | 3 |
| Cases >= Test Value | 3 |
| Total Cases | 6 |
| Number of Runs | 3 |
| Z | -.456 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .648 |
| a. Median |  |

*Sumber*: data diolah SPSS 17

Berdasarkan tabel output diatas dapat dilihat bahwa nilai median (test value) adalah -23.39678 cases < test value yaitu data yang kurang dari median berjumlah 3, casesx >= test value yaitu data yang lebih dari ataupun sama dengan nilai median berjumlah 3 total data 6, jumlah run 3 dan nilai z sebesar -456 dengan signifikansi 0,648. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi (*asymp.sig*) sebesar 0,648 > 0,05 maka Ho diterima. jadi, data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokolerasi pada data yang di uji.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual pada suatu periode pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik tidak terjadi masalah heteroskedasitas, cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar keatas ata dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit kemudian menyempit kembali. Hasil output heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 4.10**

**Hasil Uji Heterokesdastisitas**



*Sumber*: data diolah SPSS 17

Berdasarkan output yang dihasilkan maka dapat diketahui bahwa titik-titik pada pola menyebar tidak mengumpul diatas atau di bawah saja serta tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

1. **Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji regresi Linear Berganda**

| **Coefficientsa** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -2315.151 | 332.537 |  | -6.962 | .020 |
| PAD | -3.580 | 1.362 | -.501 | -2.628 | .119 |
| DAU | 1.999 | .287 | 1.143 | 6.977 | .020 |
| Kemiskinan | 139.381 | 22.432 | .783 | 6.213 | .025 |
| a. Dependent Variable: belanjamodal | | | | | | |

*Sumber*: data diolah SPSS 17

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis.setelah dilakukan uji asumsi klasik sebgai syarat memenuhi layaknya analisis regresi, maka selanjutnya dilaksanakan analisis regresi linear berganda, analisis regresi linear berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kreterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). analisis regresi linear berganda dilakukan dalam penelitian ini untuk megetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan kemiskinan terhadap Belanja Modal pada kabupaten Pringsewu periode 2011-2016.

Formulasi persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

|  |
| --- |
| **Y=a+b1X1+b2X2+e** |

|  |
| --- |
| **Y=-2315.151+-3.580+1999+139.381** |

Dimana a=konstanta=-2315.151

X1=PAD b1=-3.580

X2=DAU b2=1.999

X3= Kemiskinan b3=139.381

Koefisiensi- koefisiensi persamaan regresi linear berganda dapat diartikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa nilai konstanta menpunyai arah negative yaitu sebesar -2315.151 menunjukan apabila variabel mengalami peningkatan 1% maka variabel belanja modal mengalami penurunan sebesar 2315.151%
2. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukan bahwa koefisien regresi pada variabel 1 yaitu PAD bertanda negatif sebesar –3.580 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% PAD maka belanja modal mengalami penurunan sebesar 3.580%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negative terjadi hubungan negative antara PAD dan belanja modal. Jika semakin besar PAD di Kabupaten Pringsewu maka semakin menurun belanja modal di pringsewu. Sebaliknya, jika semakin kecil PAD maka semakin meningkat belanja modal dikabupaten pringsewu.
3. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukan bahwa koefisien regresi pada variabel 2 yaitu Dana Alokasi Umum bertanda positif sebesar 1.999 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Umum maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1.999%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif terjadi hubungan positif antara Dana Alokasi Umum dan belanja modal. Jika semakin besar Dana Alokasi Umum di Kabupaten Pringsewu maka semakin meningkat belanja modal di pringsewu. Sebaliknya, jika semakin kecil Dana Alokasi Umum maka semakin menurun belanja modal dikabupaten pringsewu
4. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukan bahwa koefisien regresi pada variabel 3 yaitu Kemiskinan bertanda positif sebesar 139.381 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% kemiskinan maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar 139.381%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif terjadi hubungan positif antara kemiskinan dan belanja modal. Jika semakin besar kemiskinan di Kabupaten Pringsewu maka semakin meningkat belanja modal di pringsewu. Sebaliknya, jika semakin kecil kemiskinan maka semakin menurun belanja modal dikabupaten pringsewu.
5. **Hasil Uji Hipotesis**
6. Uji Signifikan Parametrik Individual (uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau tidak dapat diketahui dengan kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

* + 1. Jika thitung  ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan)
    2. Jika thitung ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan)

Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut yang dimaksud dengan Ha adalah diterimanya hipotesis dan signifikan, sedangkan Ho ditolaknya hipotesis dan tidak signifikan.

Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.10. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikan 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 6-3-1 = 2, dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh ttabel sebesar 4.302

* + 1. Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik individual ( uji t) pada variabel Pendapatan Asli Daerah menghasilkan nilai sig yang lebih besar dari 0,05 ( 0,119 > 0,05 ). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ho diterima Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurang lebih 95 % tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pringsewu selama periode 2011 – 2016.
    2. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,02 ˃ 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Haditerima dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pringsewu selama periode 2011– 2016.
    3. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,02 <0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Haditerima dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pringsewu selama periode 2011– 2016.
    4. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel kemiskinan menghasilkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,02 < 0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Haditerima dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pringsewu selama periode 2011– 2016.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent (X1,X2,X3) berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap variabel dependen (Y). adapun hasil uji F pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Simultan (F)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **ANOVAb** | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. | | 1 | Regression | 135184.154 | 3 | 45061.385 | 43.997 | .022a | | Residual | 2048.373 | 2 | 1024.187 |  |  | | Total | 137232.527 | 5 |  |  |  | | a. Predictors: (Constant), Kemiskinan, DAU, PAD | | | | | | | | b. Dependent Variable: belanjamodal | | | | | | | |

*Sumber*: data diolah SPSS 17

Dari hasil uji signifikan simultan (uji F) diatas menunujukan nilai sig 0,022 < 0,05 artinya Ha di terima dan Ho di tolak sehingga dapat dikatakan adanya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat ditentukan dengan cara lain yaitu dengan menentukan terlebih dahulu Ftebel berdasarkan signifikansi 5% dengan df 1 (jumlah variabel -1) atau 4-1 = 3 dan df 2 (n-k-1) atau 6-3-1 = 2. Jadi dapat diketahui df1 = 3 dan df2 = 2. Dengan pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh untuk Fhitung sebesar 19,16 sedangkan untuk Ftabel sebesar 43.997 artinya Fhitung lebih besar dari Ftabel (19,16<43.997) maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Pringsewu.

c. Uji koefisiensi determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent nilai koefesien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, berikut hasil uji koefisiensi determinasi:

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| **Model Summaryb** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .993a | .985 | .963 | 32.00292 | 3.209 |
| a. Predictors: (Constant), Kemiskinan, DAU, PAD | | | | | |
| b. Dependent Variable: belanjamodal | | | | | |

Berdasarkan hasil pengamatan dari tabel diatas diketahui koefesiensi determinasi (R2) adalah 0,980 hal ini menunjukan besarnya kemampuan variabel bebas (independent) dalam penelitian ini untuk menerangkan variabel terikat (dependent) adalah sebesar 98,0% sehingga dapat diartikan bahwa variabel PAD DAU dan kemiskinan berpengaruh sebesar 98,0% sementara sisanya yakni 1,5% dipengeruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini seperti DAK dan DBH.

D. Pembahasan

**1. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Pringsewu**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah dan perundangan-undangan tertentu, bertujuan untuk memberikan keluasan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah itu sendiri, didalam pendapatan asli daerah terdapat beberapa indikator pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Laba BUMD, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Peningkatan belanja pemerintah dalam hal ini belanja modal dapat diketahui dengan melihat perkembangan pendapatan asli daerahnya karena Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu item yang berkaitan dengan belanja pemerintah sebab apabila terjadi peningkatan Pendapatan maka akan meningkat pula belanja pemerintah.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu dikatakan cukup baik meskipun peningkatan tidak terlalu tinggi setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu terus meningkat dari tahun 2011-2016. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan belanja modal pun akan ikut meningkat.

Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten Pringsewu tahun 2016-2011 Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukan bahwa koefisien regresi pada variabel 1 yaitu PAD bertanda negatif sebesar -3580 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% PAD maka belanja modal mengalami penurunan sebesar 3580%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negatif terjadi hubungan negatif antara PAD dan belanja modal. Jika semakin besar PAD di Kabupaten Pringsewu maka semakin menurun belanja modal di pringsewu. Sebaliknya, jika semakin kecil PAD maka semakin meningkat belanja modal dikabupaten pringsewu. Sementara berdasarkan uji 2 sisi signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan 3580 artinya thitung lebih kecil dari ttabel (-3580 < 3.182) serta nilai sig yang lebih besar dari 0,05 ( 0,119> 0,05 ). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di kabupaten pringsewu. Hal ini serupa dengan penelitan yang dilakukan oleh Rahmawati Meita Oktaviani meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan kemiskinan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. Sampel yang digunakan yaitu kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal,

Sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati dimana Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten Jawa Tengah. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Dalam agency theory hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan principal (pemerintah) ke dalam kontek pendapatan asli daerah dapat dilihat dari tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal.maka dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan belanja modal. Dimana semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan pula meningkatkan belanja modal untuk menambah aset daerah dan memperbaiki sarana dan prasarana pada suatu daerah, namun berbeda dengan keadaan pada Kabupaten Pringsewu dimana pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi belanja modal maka hal ini mengasumsikan tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pendapatan asli daerah untuk membantu kegiatan pemerintah pada Kabupaten Pringsewu.

Sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**

**Penerimaan PAD Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Laba Bumn Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Pajak | Retribusi | Laba BUMN | Lain-lain Pendapatan yang sah |
| 2011 | 5.156.139,00 | 1.563.994,00 | 0,00 | 12.6267.084,00 |
| 2012 | 7.676.122,00 | 1.964.185,00 | 0,00 | 19.450.326,00 |
| 2013 | 8.476.107,00 | 2.466.590,00 | 43.412,00 | 19.455.012,00 |
| 2014 | 11.279.888,98 | 2.299.715,26 | 450.754,72 | 49.309.381,46 |
| 2015 | 12.949.400,00 | 2.844.536,00 | 616.008,00 | 45.355192,00 |
| 2016 | 15.582.621,00 | 3.181.924,00 | 626.299,00 | 48.766.933,00 |

Sumber:*Badan Pusat Statistik Kab Pringsewu*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pajak, retribusi daerah, laba bumn dan lain-lain pendapatan asli yang sah pada kabupaten pringsewu selalu meningkat pada setiap tahunnya namun peningkatannya masih sangat kecil dengan begitu untuk menunjang pendapatan asli daerah yang besar masih di butuhkan peningkatan yang sangat besar pada sektor pajak, retribusi, laba bumn dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Hasil analisis mengapa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Pringsewu, pasalnya porsi pendapatan asli daerah masih sangat kecil dibanding pendapatan yang lain, kontribusi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah pun masih sangat sedikit seperti pajak dan retribusi daerah, kemungkinan karena kondisi ini lah pemerintah daerah lebih cenderung mengalokasikan pendapatan asli daerah untuk pos lain seperti belanja pegawai, belanja barang atau belanja operasional lainnya. Sehingga kurang meratanya pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pada kabupaten pringsewu. Pringsewu merupakan kabupaten yang baru saja mengalami pemekaran dari kabupaten tanggamus hal tersebut juga mungkin menjadi salah satu faktor penyebab masalah kurang tertibnya penggunaan atau pengelolaan sumberdaya alam oleh pemerintah kurangnya pemerintah dalam mengelola kekayaan sumberdaya pun menjadi faktor yang menyebab kan penerimaan pendapatan asli daerah kurang memadai, dan juga kepatuhan masyarakat kabupaten pringsewu dalam membayar pajak dan retribusi pun masih kurang tertib sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

**2. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Pringsewu**

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil Dana Alokasi Umum yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut

Hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau Pendapatan Asli Daerah berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Aloksi Umum berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada Kabupaten Pringsewu tahun 2016-2011 Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukan bahwa koefisien regresi pada variabel 2 yaitu Dana Alokasi Umum bertanda positif sebesar 1999 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Umum maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1999 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif terjadi hubungan positif antara Dana Alokasi Umum dan belanja modal. Sementara berdasarkan uji 2 sisi signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,020 <0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pringsewu selama periode 2011– 2016. Dana alokasi umum yang di berikan pada kabupaten pringsewu sudah di kategorikan cukup besar hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar dana alokasi umum yang di berikan kepada pemerintah maka semakin besar untuk alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum memiliki peranan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah kabupaten pringsewu karena berdasarkan pendapatan dari DAU yang besar maka belanja modal juga besar kemudian setelah belanja modal di tingkatkan maka infrastruktur daerah akan meningkat, dengan begitu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. sebagai general purpose, keberadaan DAU dilandasi oleh *prinsipcathegorical equity* (keadilan kategori) menyatakan bahwa seluruh warganegara dimana pun berada berhak mendapat pelayanan dasar (seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, infrastruktur daerah, dll pada standar minimum tertentu, oleh karena pelayanan dasar adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang miskin harus diberi bantuan agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar minimum tersebut. Artinya pengalokasian DAU yang optimal adalah dapat meratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyediaan pelayanan dasar tertentu pada standar minimum nasional.

**3. Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Pringsewu**

Kemiskinanadalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemiskinan sampai saat ini masih dianggap sebagai persoalan ekonomi yang serius oleh karena itu keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menanggulangi kemiskinan mutlak di perlukan. Bentuk keberpihakan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal. kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah, dimana pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, hal ini telah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan daerahnya sendiri menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah di tuntut harus mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemeratan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga pada akhirnya kemiskinan bisa terentaskan dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Pada kabupaten pringsewu dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi maka pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kiranya berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. . Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pengaruh kemiskinan terhadap belanja modal pada Kabupaten Pringsewu tahun 2016-2011 Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukan bahwa koefisien regresi pada variabel 3 yaitu kemiskinan bertanda positif sebesar 139.381 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% kemiskinan maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar 139.381 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif terjadi hubungan positif antara kemiskinan dan belanja modal. Sementara berdasarkan uji 2 sisi signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,025 <0,05). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pringsewu selama periode 2011– 2016. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa apabila tingkat kemiskinan meningkat maka belanja modalpun akan meningkat.

**4. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah pada Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pembangunan adalah komponen terpenting dalam Ekonomi Islam, pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan didalam islam bukan hanya sebatas pembangunan dalam hal infrastruktur sarana dan prasarana tetapi harus diikuti pula dengan pembangunan secara moral dan spritual setiap masyarakatnya. Anggaran belanja modal harus di gunakan sebaik- baik nya pada kabupaten pringsewu dapat dilihat dari penganggaran belanja modal yang tiap tahun meningkat pada tahun 2011 digunakan 105.833.817 kemudian pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 193.566259 kemudian menurun ke 165.790.708 dengan ini tidak sesuai dengan penerimaan dari dana PAD dan DAU yang besar kemungkinan hal ini lah yang menjadi penyebab infrastruktur di kabupaten pringsewu kurang memadai masih banyak jalan yang rusak.

Pembangunan dapat dicapai menggunakan dana yang dimana dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang di realisasikan kedalam keuangan publik, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar maka pemerintah harus mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan kedalam anggaran belanja dengan baik. Dalam islam untuk mencapai kesejahteraan atau fallah yang baik tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan publik rakyatnya yaitu membangun sarana dan prasana dan kemudian memperbaiki infrastruktur pada daerah dengan jalan mengalokasikan penerimaan pemerintah untuk kegiatan belanja..

Menurut Huda, kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal dimana pemerintah atau Negara membelanjakan pendapatan yang telah di kumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah Negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula maka Negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan dengan baik maka pemerintah harus memiliki kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal sudah ada sejak jaman Rasulullah dan Khulafaurrasydin tujuan dari kebijakan fiskal dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi , tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Pada zaman rasulullah penerimaan pemerintah terdiri dari 2 sumber yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Penerimaan dari sumber utama adalah fai, kharaj, jizyah dan ushr, disamping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan pada masa rasulullah saw ada sumber pendapatan sekunder. Diantaranya adalah Uang Tebusan untuk para tawanan perang, Pinjam-pinjaman (setelah penaklukan kota mekah), *Khumus*, *Amwal* meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang Wakaf*, Nawaib,*Zakat fitrah, Bentuk lain sedekah seperti *qurban* dan *kaffarat.* Kemudian semua pendapatan tersebut di depositokan kepada pihak baitul mall, dengan tujuan untuk di kelola oleh baitul mall setelah itu akan di gunakan untuk kepentingan publik, pada zaman rasulullah jarang sekali mengalami defisit karena para pemimpin memegang teguh prinsip jika tidak ada pendapatan maka tidak dilakukan pengeluaran.

Zaman Rasulullah berbeda dengan masa sekarang dimana penerimaan pendapatan pemerintah sudah mulai beragam seperti hal nya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta penerimaan lainnya yang digunakan untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mengalokasikannya pendapatan untuk belanja,

Belanja Negara dalam konsep ekonomi islam harus sesuai dengan syariah dan penentuan skala prioritas, ada beberapa tujuan belanja dalam islam adalah sebagai Pemenuhan kebutuhan, pendidikan, pertahanan, keaman sosial, sumbangan, dan pembangunan. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika pemerintah mengalokasikan dana untuk belanja modal karena belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Peningkatan alokasi belanja modal dalam aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas,

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam. Pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoprasikan *public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.

Pemerintah daerah dalam menyelanggarakan pelayanan publik harus melihat kepentingan masyarakat, dalam islam penerimaan atau kekayaan yang dimiliki tidak boleh di pergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan untuk bersama sama dalam mencapai fallah, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam surat Q.S Al-Hasr (59):7 berikut ini:

….

*Artinya:.......supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.......*

Penjelasan ayat diatas adalah Allah Swt jelas-jelas memerintahkan supaya sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, Negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah. Negara harus mendistrbusikan pendapatan atau kekayaan Negara dengan secara adil dan merata kesemua kalangan masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapat yang berada ditangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.

Pembelanjaan dalam islam harus ditujukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, pengeluaran haruslah ditunjukan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros, dan islam mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan penimbunan itu, kekayaan tak dapat beredar dan manfaat penggunaanya tidak dapat di nikmati si pengguna ataupun masyarakat. Allah SWT berfirman dalam al-quran surat Al-furqon ayat 67:

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa sebagai peringatan bagi seseorang yang mempunyai harta yang banyak bahwa tidak boleh menggunakan hartanya secara boros, penggunaan harta tidak boleh untuk berfoya-foya yang tidak ada manfaatnya, lebih baik digunakan untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal pemerintahan ayat ini berkaitan dengan pendapatan yang di peroleh untuk digunakan belanja yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, pendapatan daerah harus beredar di kalangan masyarakat, misal nya digunakan untuk belanja modal yang bertujuan memberikan fasilitas, sarana secara baik kepada masyarakat. Ketika belanja modal porsinya lebih besar maka akan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga akan tercipta kemaslahatan terhadap masyarakat sesuai dengan tujuan belanja dalam perspektif islam.